

Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia

Inka Nusamuda Pratama¹

¹ Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

inka.nusamuda@ummat.ac.id

Keywords: Factor; Solution; Money politic; Election

Abstract: *This research aims to analyze the factors causing the practice of money politics in the context of the 2024 elections in Indonesia and formulate effective solutions to overcome this problem. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through literature reviews from journals, online media, print media and direct observations related to the causal factors and solutions to overcome money politics in the context of the 2024 election. The practice of money politics has become a serious issue that threatens the integrity and sustainability of democracy in Indonesia. This research identifies causal factors, including the role of economic and financial resources, political culture, and lack of strict law enforcement, which influence the practice of money politics in elections. Furthermore, this research also formulates solutions that include stricter law enforcement, increased transparency in political campaign financing, as well as public education and awareness about the importance of elections that are free from financial influence. The results of this research can provide a deeper insight into how to protect election integrity and maintain strong democracy in Indonesia. This research is also relevant because it can help stakeholders, including the government and NGOs, in designing more effective policies and programs to overcome the problem of money politics, so that the 2024 elections can take place more fairly, transparently and free from destructive money politics practices.*

Kata Kunci:
Faktor; Solusi;
Politik Uang;
Pemilu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab praktik politik uang dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia dan merumuskan solusi-solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui literatur review dari jurnal, media online, media cetak dan observasi langsung terkait dengan faktor-faktor penyebab dan solusi mengatasi politik uang dalam konteks pemilu 2024. Praktik politik uang telah menjadi isu serius yang mengancam integritas dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, termasuk peran ekonomi dan sumber daya finansial, budaya politik, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas, yang memengaruhi praktik politik uang dalam pemilihan. Selanjutnya, penelitian ini juga merumuskan solusi-solusi yang mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye politik, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bebas dari pengaruh finansial. Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana melindungi integritas pemilu dan menjaga demokrasi yang kuat di Indonesia. Penelitian ini juga relevan karena dapat membantu pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan LSM, dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mengatasi masalah politik uang, sehingga pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik politik uang yang merusak.

Article History:

Received : 14-07-2022

Online : 19-08-2022



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license



A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah salah satu pilar utama dalam proses demokratisasi sebuah negara. Di Indonesia, sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia dengan populasi yang besar dan beragam, pemilu memiliki peran kunci dalam menjalankan sistem politiknya. Pemilu tidak hanya sebagai mekanisme penentuan pemimpin dan perwakilan rakyat, tetapi juga sebagai wahana bagi warga negara untuk mengungkapkan suara mereka dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, praktik politik uang telah menjadi ancaman serius bagi integritas dan kelangsungan demokrasi di Indonesia (Pratama et al., 2023)..

Praktik politik uang, yang melibatkan pemberian uang tunai atau imbalan materi kepada pemilih atau calon pemilih dengan tujuan memengaruhi hasil pemilihan, telah merusak proses pemilu secara mendasar. Hal ini tidak hanya merendahkan martabat demokrasi dengan menggeser beratnya pemilihan dari substansi ke transaksi finansial, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan politik secara keseluruhan (Nusamuda & Subandi, 2022). Akibatnya, pemilih menjadi terpinggirkan dalam proses politik yang semestinya mereka kendalikan, sementara calon-calon yang memiliki sumber daya finansial lebih besar cenderung mendominasi panggung politik (Pratama & Mutiarin, 2019). Dalam konteks pemilu 2024 yang akan datang, penting untuk menyadari dampak serius praktik politik uang ini dan mencari solusi yang efektif untuk memulihkan integritas pemilu, memperkuat demokrasi, dan memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dalam proses politik Indonesia.

Pemilu 2024 di Indonesia diantisipasi sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia, melibatkan jutaan pemilih yang akan memilih pemimpin mereka dan menentukan arah politik negara selama beberapa tahun ke depan. Pemilu merupakan momen penting di mana suara rakyat harus tercermin dengan jelas dan adil dalam hasil pemilihan. Namun, keberhasilan pemilu ini dihadapkan pada tantangan serius dalam bentuk praktik politik uang yang masih menjadi perhatian utama (Nusamuda Pratama et al., 2021). Praktik politik uang, seperti pemberian uang atau imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi hasil pemilihan, telah merusak integritas pemilu dan merongrong dasar-dasar demokrasi di Indonesia.

Meskipun sudah ada berbagai upaya dari pemerintah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan praktik politik uang, tantangan ini masih terus ada dan mungkin akan meningkat dalam Pemilu 2024. Faktanya, praktik ini memiliki akar yang dalam dalam struktur politik dan sosial Indonesia, yang memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Tantangan utama dalam mengatasi politik uang adalah memastikan penegakan hukum yang kuat, meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bebas dari pengaruh finansial. Hanya dengan upaya kolaboratif yang kuat dan kesadaran publik yang tinggi, kita dapat berharap untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih, adil, dan dapat dipercaya dalam konteks Pemilu 2024 dan masa depannya, menjaga integritas demokrasi Indonesia (Pratama, 2022).

Oleh karena itu, penelitian yang membahas faktor-faktor penyebab dan solusi untuk mengatasi praktik politik uang dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia memiliki latar belakang yang sangat penting. Memahami akar permasalahan dan faktor-faktor yang memicu praktik politik uang adalah langkah awal yang krusial dalam upaya menjaga integritas pemilu dan demokrasi yang kuat. Penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang dinamika politik uang,

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 13 Juli 2022

ISSN 2964-6871 | Volume 1 Juli 2022

pp. 761-767

termasuk bagaimana jaringan politik dan ekonomi terlibat dalam praktik tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik politik uang, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih terarah dan efektif.

Selain itu, relevansi penelitian ini sangat penting bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih baik, langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat, serta program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat yang dapat mengurangi praktik politik uang. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi alat yang berguna dalam upaya menciptakan Pemilu 2024 yang lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik politik uang yang merusak demokrasi. Hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan dan mendorong partisipasi aktif dalam membangun masa depan politik Indonesia yang lebih baik.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial yang kompleks, serta memberikan penjelasan yang lebih detail dan mendalam terhadap suatu masalah yang diteliti (Pratama, 2023). Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini ingin memfokuskan pada kasus atau fenomena tertentu yang terjadi dalam satu lokasi, yaitu faktor penyebab dan solusi mengatasi politik uang dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian akan menggali secara mendalam mengenai bagaimana faktor penyebab dan solusi mengatasi politik uang dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia. Data dikumpulkan melalui *literatur review* dari jurnal, media online, media cetak dan observasi langsung terkait dengan faktor penyebab dan solusi mengatasi politik uang dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia (Pratama et al., 2022) (Rahmad Hidayat, 2023). *Literatur review* dilakukan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai faktor penyebab dan solusi mengatasi politik uang dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia (Pratama et al., 2021).

Sumber data yang digunakan meliputi jurnal, media online, dan media cetak yang membahas mengenai faktor penyebab dan solusi mengatasi politik uang dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia (Pratama et al., 2023). Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam (Nusamuda Pratama et al., 2021). Selain itu, data juga dikumpulkan melalui analisis dokumen terkait. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan dokumen lain yang terkait dengan faktor penyebab dan solusi mengatasi politik uang dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Praktik Politik Uang:

Peran ekonomi dan sumber daya finansial dalam praktik politik uang merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan finansial kandidat dan partai politik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terlibat dalam praktik politik uang. Kandidat yang memiliki dana lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memanfaatkannya dalam upaya memenangkan pemilihan. Mereka dapat menggunakan sumber daya ini untuk memberikan imbalan finansial kepada pemilih potensial

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 13 Juli 2022

ISSN 2964-6871 | Volume 1 Juli 2022

pp. 761-767

dengan harapan memperoleh dukungan mereka.

Selain itu, sumber daya finansial yang mencukupi juga dapat digunakan untuk mengamankan sumber daya politik yang penting, seperti media massa dan kampanye yang efektif. Kandidat yang memiliki dana lebih besar memiliki akses yang lebih mudah ke media yang dapat membentuk opini publik dan memengaruhi pemilih. Oleh karena itu, praktik politik uang bukan hanya tentang memberikan uang kepada pemilih, tetapi juga tentang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya politik yang penting. Hal ini dapat menggoyahkan prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama. Dengan memahami peran penting sumber daya finansial dalam praktik politik uang, langkah-langkah dapat diambil untuk membatasi pengaruh finansial yang tidak seimbang dalam pemilihan dan menjaga integritas demokrasi.

Peran budaya politik dan norma sosial dalam mendorong praktik politik uang dalam pemilu adalah aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memahami dan mengatasi masalah ini. Budaya politik dalam konteks ini merujuk pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkaitan dengan politik di masyarakat. Dalam beberapa kasus, praktik politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik di beberapa daerah di Indonesia. Politik uang dianggap sebagai norma yang diterima secara sosial, di mana calon politik diharapkan untuk memberikan uang kepada pemilih sebagai bagian dari kampanye mereka. Norma ini menciptakan tekanan sosial pada calon politik untuk terlibat dalam praktik politik uang, bahkan jika mereka memiliki niat yang baik.

Selain budaya politik, norma sosial juga berperan penting dalam mempertahankan praktik politik uang. Norma-norma ini mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap praktik politik dan pemilihan umum. Jika masyarakat menganggap bahwa memberikan atau menerima uang dalam pemilihan adalah hal yang wajar atau bahkan diharapkan, maka praktik politik uang akan sulit dihilangkan. Oleh karena itu, perubahan budaya politik dan norma sosial menjadi kunci untuk mengatasi masalah politik uang. Masyarakat perlu diajak untuk memahami pentingnya pemilihan yang bersih dan bebas dari pengaruh finansial serta untuk menilai kandidat berdasarkan kapabilitas dan visi mereka, bukan imbalan finansial yang diberikan. Upaya edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengubah norma-norma ini dan merubah paradigma pemilih dalam mendukung pemilu yang lebih bermartabat dan adil.

Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang merupakan hambatan utama dalam upaya mengatasi masalah ini di Indonesia. Penelitian telah mengungkapkan bahwa ketika tidak ada sanksi yang memadai atau penegakan hukum yang efektif terhadap praktik politik uang, pelaku politik uang merasa bahwa mereka dapat melakukan praktik tersebut tanpa risiko signifikan. Ini menciptakan lingkungan di mana praktik politik uang dapat berkembang secara bebas dan merajalela tanpa takut konsekuensi hukuman yang serius. Kebijakan dan undang-undang yang ada mungkin sudah ada, tetapi jika tidak ditegakkan dengan tegas dan konsisten, mereka menjadi hampa makna.

Selain itu, kurangnya penegakan hukum yang tegas juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan sistem peradilan. Masyarakat dapat merasa bahwa pelaku politik uang memiliki perlindungan atau keuntungan tertentu, yang dapat menggerus keyakinan mereka bahwa pemilu adalah proses yang adil dan berintegritas. Oleh karena itu, untuk mengatasi praktik politik uang dengan efektif, penegakan hukum yang tegas dan adil harus menjadi prioritas. Ini mencakup penyelidikan yang mendalam, pengadilan yang adil, dan

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 13 Juli 2022

ISSN 2964-6871 | Volume 1 Juli 2022

pp. 761-767

sanksi yang memadai bagi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang. Dengan penegakan hukum yang tegas, pelaku politik uang akan memiliki insentif yang lebih besar untuk mematuhi hukum dan masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa pemilu benar-benar dapat menjadi wadah demokratis yang bersih dan adil.

Solusi untuk Mengatasi Politik Uang:

Penegakan hukum yang ketat terhadap praktik politik uang adalah langkah kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Solusi ini memerlukan penegakan hukum yang berani dan tegas terhadap para pelaku politik uang. Dalam rangka memperkuat penegakan hukum, perlu adanya revisi dan peningkatan dalam undang-undang yang mengatur pemilu dan praktik politik uang. Sanksi yang lebih berat dan efektif harus disusun dan diterapkan kepada mereka yang terlibat dalam praktik politik uang, termasuk calon politik, partai politik, dan pendukungnya. Sanksi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi penahan serius bagi para pelaku politik uang, sehingga risiko hukuman yang signifikan akan mengurangi insentif untuk melibatkan diri dalam praktik tersebut.

Selain itu, penegakan hukum yang ketat juga memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan cermat, kasus-kasus politik uang diadili secara adil, dan sanksi yang tegas diberikan kepada pelaku yang terbukti bersalah. Selain itu, transparansi dalam proses hukum dan akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum juga penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang, kita dapat menciptakan lingkungan di mana praktik ini menjadi lebih berisiko, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan dan integritas pemilu dapat dipertahankan.

Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye politik adalah langkah penting dalam upaya mengatasi praktik politik uang. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika sumber dan penggunaan dana kampanye lebih transparan, masyarakat dapat dengan lebih baik memahami darimana dana kampanye politik berasal dan bagaimana dana tersebut digunakan. Hal ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada publik untuk mengawasi praktik politik uang dan mempertanyakan calon politik atau partai yang mungkin terlibat dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan peraturan yang memerlukan pelaporan yang jelas tentang asal-usul dana kampanye, serta pengeluaran yang terkait dengan kampanye politik, adalah langkah positif yang dapat membantu menciptakan transparansi yang lebih besar dalam proses politik.

Selain itu, pemantauan yang lebih ketat terhadap pembiayaan kampanye dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran dengan lebih efektif. Mereka yang mencoba melanggar aturan pembiayaan kampanye akan lebih berhati-hati ketika tahu bahwa mereka diawasi secara ketat. Organisasi independen, lembaga pengawasan pemilu, dan LSM dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelaporan dana kampanye berjalan lancar dan tidak ada yang luput dari pengawasan. Peningkatan transparansi ini juga dapat membantu mengurangi peluang bagi mereka yang ingin menggunakan praktik politik uang untuk memengaruhi hasil pemilihan. Dengan pembiayaan kampanye yang lebih terbuka dan akuntabel, kita dapat menciptakan pemilihan yang lebih bersih dan bebas dari pengaruh finansial yang merusak.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan pilar penting dalam upaya jangka panjang untuk mengatasi praktik politik uang dalam pemilihan. Melalui program-program pendidikan publik yang efektif, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 13 Juli 2022

ISSN 2964-6871 | Volume 1 Juli 2022

pp. 761-767

demokrasi, hak pilih mereka, dan dampak negatif dari praktik politik uang terhadap integritas pemilihan. Edukasi seperti ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat tentang politik dan pemilihan, menjauhkan mereka dari pandangan bahwa penerimaan uang dalam pemilihan adalah hal yang wajar. Sebaliknya, masyarakat akan lebih cenderung untuk menilai kandidat berdasarkan integritas, visi, dan kebijakan yang mereka usung.

Selain pendidikan, kampanye kesadaran juga memiliki peran kunci dalam merubah norma budaya politik yang merugikan. Kampanye ini dapat membantu menciptakan atmosfer di mana praktik politik uang dianggap tidak etis dan merusak demokrasi. Melalui penyuluhan, diskusi publik, dan kampanye informasi, masyarakat dapat diberikan alat untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menolak praktik politik uang. Kesadaran yang lebih tinggi juga dapat memotivasi pemilih untuk mengambil peran aktif dalam menjaga pemilihan yang bersih dan adil. Dengan pendidikan dan kesadaran yang ditingkatkan, masyarakat memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang kuat dalam memerangi praktik politik uang dan memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dalam suasana yang lebih transparan dan demokratis.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor seperti peran ekonomi dan sumber daya finansial, budaya politik, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas telah diidentifikasi sebagai penyebab utama praktik politik uang. Di sisi lain, solusi untuk mengatasi masalah ini melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bebas dari pengaruh finansial.

Penguatan Penegakan Hukum: Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap praktik politik uang dengan menerapkan sanksi yang lebih berat dan efektif bagi para pelaku politik uang. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu.

Peningkatan Transparansi Pembiayaan Kampanye: Diperlukan reformasi dalam sistem pembiayaan kampanye politik untuk memastikan transparansi yang lebih besar. Undang-undang pembiayaan kampanye harus direvisi untuk memperkuat persyaratan pelaporan dan pengawasan sumber dan penggunaan dana kampanye.

Kampanye Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah, LSM, dan kelompok masyarakat sipil harus bekerja sama dalam melaksanakan program-program pendidikan publik dan kampanye kesadaran untuk mengubah norma budaya politik yang merugikan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemilihan yang bersih dan partisipasi aktif dalam menjaga demokrasi.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Pemangku kepentingan, termasuk partai politik, harus berperan aktif dalam mengatasi praktik politik uang dengan mengadopsi praktik-praktik yang bersih dan mendukung reformasi pembiayaan kampanye yang lebih transparan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penelitian ini. Dukungan moral dari keluarga dan teman-teman sangat membantu dalam mengatasi berbagai tantangan selama penelitian berlangsung. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi masyarakat.

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 13 Juli 2022

ISSN 2964-6871 | Volume 1 Juli 2022

pp. 761-767

REFERENSI

- Nusamuda, I., & Subandi, A. (2022). POLICY STREAM DALAM TAX AMNESTY UNDANG-UNDANG NOMOR. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 183–188.
- Nusamuda Pratama, I., Hadi, A., Zitri, I., & Abstrak, I. A. (2021). Manajemen Bencana Non Alam Covid-19 Dilihat Dari Kepemimpinan Quadruple Helix di Kota Mataram. *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2).
- Pratama, I. N. (2022). Pendidikan Politik Dalam Rangka Penguatan Partisipasi Politik Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Desa Jurumapin. *TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 2(3), 5–12.
- Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77.
- Pratama, I. N., Darmansyah, D., Hadi, A., Lestanata, Y., & Hidayatullah, H. (2022). Pengaruh Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i1.18>
- Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram. *Jurnal Public Policy*, 9(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439>
- Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). FORMULASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1). <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.15>
- Pratama, I. N., Zitri, I., Hadi, A., Lestanata, Y., & Umami, R. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Mataram. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 138–147.
- Rahmad Hidayat, I. N. P. (2023). Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Menjaga Destinasi Wisata Pantai Loang Baloq. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(3), 431–438.